



Research Article

Primordialisme Politik dalam Demokrasi Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Preferensi Identitas dalam Pemilihan Pemimpin

Anjas Saputra¹, Muh Imam Sejati², Mustafa³, Kurniati⁴

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; 10200123052@uin-alauddin.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; 10200123050@uin-alauddin.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; 10200123071@uin-alauddin.ac.id
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; kurniati@uin-alauddin.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 16, 2026
Accepted : June 20, 2026

Revised : May 18, 2026
Available online : July 27, 2026

How to Cite: Anjas Saputra, Muh Imam Sejati, Mustafa, M., & Kurniati, K. (2026). Political Primordialism in Indonesia's Democratic System: An Islamic Constitutional Law Analysis of Identity-Based Preferences in the Election of Political Leaders. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(3), 309-321. <https://doi.org/10.61166/values.v3i3.183>

Political Primordialism in Indonesia's Democratic System: An Islamic Constitutional Law Analysis of Identity-Based Preferences in the Election of Political Leaders

Abstract. This study examines the phenomenon of political primordialism in Indonesian democracy through the perspective of Islamic constitutional law as a normative framework, focusing on how identity based preferences such as religion, ethnicity, and group affiliation influence voters' choices in leadership elections and how these practices are evaluated within Islamic leadership principles. Departing from the tension between the ideal of rational democracy and the empirical reality of rising identity politics, this research employs a qualitative approach with a descriptive analytical method integrating empirical data and normative analysis of the principles of trustworthiness, justice, and competence. The findings show that political primordialism functions not only as a strategy for

electoral mobilization by political actors but is also interpreted by voters as a form of collective identity representation, however from the perspective of Islamic constitutional law such practices tend to deviate as they prioritize identity over leadership quality which consequently weakens political rationality and undermines the principles of justice and public welfare in governance.

Keyword: Political Primordialism, Identity Politics, Democracy, Islamic Constitutional Law, Islamic Leadership.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena primordialisme politik dalam demokrasi Indonesia dengan pendekatan hukum tata negara Islam sebagai kerangka normatif, dengan fokus pada bagaimana preferensi identitas berbasis agama, etnis, dan afiliasi kelompok memengaruhi pilihan pemilih dalam pemilihan pemimpin serta bagaimana praktik tersebut dinilai dalam prinsip kepemimpinan Islam. Berangkat dari ketegangan antara idealitas demokrasi yang rasional dan realitas empiris yang menunjukkan menguatnya politik identitas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang mengintegrasikan data empiris dan telaah normatif terhadap prinsip amanah, keadilan, dan kapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa primordialisme politik tidak hanya berfungsi sebagai strategi mobilisasi elektoral oleh aktor politik tetapi juga dimaknai oleh pemilih sebagai representasi identitas kolektif, namun dalam perspektif hukum tata negara Islam praktik tersebut cenderung menyimpang karena mengedepankan identitas dibanding kualitas kepemimpinan sehingga berimplikasi pada melemahnya rasionalitas politik serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pemerintahan.

Kata Kunci: Primordialisme Politik, Politik Identitas, Demokrasi, Hukum Tata Negara Islam, Kepemimpinan Islam

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam konsepsi ideal menempatkan warga negara sebagai subjek yang rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Pilihan tersebut seharusnya didasarkan pada pertimbangan program, kapasitas, serta integritas kandidat yang bersaing. Dengan demikian, pemilihan umum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural semata, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif (Cai, 2024). Dalam perspektif hukum tata negara, termasuk dalam tradisi pemikiran Islam, kepemimpinan ideal ditentukan oleh prinsip *alamanah* (integritas), *al-kifayah* (kapasitas), dan *al-'adalah* (keadilan). Artinya, kriteria kepemimpinan tidak semestinya ditentukan oleh faktor primordial seperti kesukuan, agama, atau afiliasi identitas yang sempit. Oleh karena itu, demokrasi yang matang menuntut agar preferensi berbasis identitas tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin (Zamzamy, 2025).

Namun demikian, realitas demokrasi di Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda. Sejak era reformasi hingga berbagai kontestasi politik terbaru, praktik demokrasi justru memperlihatkan semakin kuatnya politik identitas dan sentimen primordial yang digunakan sebagai strategi mobilisasi elektoral. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa politik identitas telah menjadi fenomena yang melekat dalam perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dan cenderung berulang dalam setiap momentum pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu 2024 misalnya, eksploitasi sentimen identitas yang berbasis agama, etnis, maupun afiliasi kelompok masih sering digunakan untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Kondisi

tersebut pada beberapa kasus juga memicu polarisasi sosial yang cukup tajam di masyarakat (Sejati, 2023).

Fenomena ini semakin diperkuat dengan berkembangnya ruang publik digital. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadi ruang yang mempercepat reproduksi dan penyebaran sentimen primordial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan politik identitas di media sosial turut berkontribusi pada meningkatnya disintegrasi sosial, fanatisme kelompok, serta munculnya perilaku diskriminatif dalam proses pemilu. Bahkan beberapa data terbaru memperlihatkan adanya peningkatan signifikan ujaran kebencian serta polarisasi berbasis identitas dalam diskursus politik digital di Indonesia, khususnya menjelang pemilihan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat tidak selalu terbentuk melalui pertimbangan rasional terhadap program atau kapasitas kandidat, melainkan juga dipengaruhi oleh ikatan identitas yang bersifat emosional dan eksklusif (Latifa, d., 2023).

Lebih jauh lagi, politik identitas tidak hanya muncul sebagai fenomena sosial yang spontan, tetapi dalam beberapa kasus telah menjadi bagian dari strategi politik yang digunakan secara sadar oleh aktor tertentu. Penggunaan simbol agama, narasi keagamaan, hingga dikotomi antara kelompok yang dianggap sama dan kelompok yang dianggap berbeda sering dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan elektoral. Dalam beberapa situasi bahkan terdapat aktor politik yang secara terbuka memposisikan dirinya sebagai representasi dari identitas kelompok tertentu. Praktik semacam ini pada akhirnya memperkuat legitimasi politik yang berbasis primordialisme. Akibatnya, kontestasi politik yang seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan dan program sering bergeser menjadi arena mobilisasi sentimen identitas yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi secara substantif (Lubis F, 2024).

Situasi tersebut menimbulkan persoalan yang tidak sederhana, baik secara normatif maupun empiris. Dari sisi normatif, dominasi politik berbasis primordialisme bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan seluruh warga negara dalam posisi setara serta mendorong penggunaan rasionalitas publik dalam proses politik. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, fenomena ini juga menimbulkan persoalan karena dapat mengaburkan kriteria normatif kepemimpinan yang seharusnya didasarkan pada kapasitas, amanah, dan keadilan, bukan pada identitas partikular. Sementara itu, secara empiris, politik identitas juga berpotensi memicu fragmentasi sosial, konflik horizontal, bahkan dapat mengancam integrasi nasional apabila tidak dikelola secara bijak (I Putu Sastra Wingarta, 2021).

Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana primordialisme politik bekerja dalam membentuk preferensi pemilih dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, penting pula untuk menelaah fenomena ini secara kritis melalui perspektif hukum tata negara Islam. Permasalahan ini menunjukkan adanya celah kajian yang belum banyak dibahas secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung melihat politik identitas hanya sebagai fenomena sosiologis atau strategi politik praktis tanpa mengaitkannya secara serius dengan kerangka normatif hukum tata negara Islam. Padahal perspektif ini

memiliki potensi analitis yang cukup kuat untuk menilai legitimasi praktik politik berbasis identitas, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang mayoritas (Pribadi, y, 2021) .

Dengan demikian terdapat kesenjangan penelitian atau research gap yang cukup jelas, yaitu belum adanya sintesis yang memadai antara analisis empiris mengenai primordialisme politik dalam demokrasi Indonesia dengan kerangka normatif hukum tata negara Islam. Banyak penelitian sebelumnya berhenti pada tahap deskripsi fenomena atau memberikan rekomendasi normatif yang masih bersifat umum. Selain itu kajian yang secara khusus menelaah bagaimana preferensi identitas dimaknai oleh aktor politik maupun pemilih dalam konteks sosial tertentu juga masih relatif terbatas. Akibatnya dimensi pemaknaan subjektif terhadap praktik politik identitas belum banyak dieksplorasi secara mendalam (Sukti S, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam praktik dan konstruksi primordialisme politik dalam demokrasi Indonesia, memahami makna yang dilekatkan oleh aktor politik maupun pemilih terhadap preferensi identitas dalam pemilihan pemimpin, serta menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hukum tata negara Islam sebagai kerangka normatif yang kritis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik dengan menghadirkan sintesis antara studi politik identitas dan hukum tata negara Islam yang selama ini sering berkembang secara terpisah. Sementara itu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya penguatan demokrasi substantif di Indonesia, terutama dalam mengurangi dampak negatif dari praktik politik berbasis identitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin menguatnya kecenderungan primordialisme dalam politik Indonesia kontemporer, terutama dalam era demokrasi digital yang mempercepat penyebaran sentimen identitas di ruang publik. Jika fenomena ini tidak dikaji secara kritis dan komprehensif terdapat kemungkinan bahwa demokrasi akan semakin bergeser dari ruang rasional menuju ruang yang lebih emosional dan eksklusif. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas demokrasi, tetapi juga dapat mengaburkan prinsip kepemimpinan yang adil dan kompeten (Testriono T, 2024). Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan baik dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam fenomena primordialisme politik dan preferensi identitas pemilih dalam praktik demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga untuk menganalisisnya secara kritis dalam perspektif hukum tata negara Islam. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep kepemimpinan dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami

realitas praktik politik identitas dalam masyarakat serta bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan demokrasi, politik identitas, dan hukum tata negara Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, mengklasifikasikan, serta menafsirkan informasi yang diperoleh agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana fenomena primordialisme politik mempengaruhi preferensi identitas dalam pemilihan pemimpin serta bagaimana fenomena tersebut dapat ditinjau secara kritis dalam kerangka hukum tata negara Islam.

PEMBAHASAN

Konstruksi dan Pemaknaan Preferensi Identitas dalam Perilaku Pemilih di Indonesia

Preferensi identitas yang berbasis suku, etnis, agama, dan budaya dalam praktik demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami sebagai kecenderungan alamiah yang melekat pada pemilih. Fenomena tersebut lebih tepat dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi kompleks antara aktor politik, media, serta struktur sosial yang lebih luas. Dalam kerangka ini, identitas tidak bersifat statis, melainkan terus diproduksi dan direproduksi melalui praktik diskursif yang menghubungkan afiliasi sosial dengan pilihan politik (Sobari W, 2023). Aktor politik memegang peran penting dalam proses tersebut dengan secara strategis mengaktivasi identitas tertentu melalui penggunaan simbol, narasi, dan representasi kolektif guna membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Dengan demikian, identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi juga menjadi instrumen mobilisasi politik yang efektif dalam mengonsolidasikan dukungan elektoral (Kreiss, 2020).

Proses konstruksi identitas tersebut semakin menguat pada era digital, ketika media sosial menjadi ruang produksi sekaligus distribusi wacana identitas yang berlangsung secara intensif. Melalui mekanisme algoritmik dan pola interaksi yang cenderung homogen, ruang digital mendorong terbentuknya polarisasi berbasis identitas yang pada gilirannya mempersempit ruang deliberasi rasional. Isu-isu politik yang kompleks sering kali direduksi menjadi dikotomi identitas yang sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh pemilih. Dalam situasi ini, identitas tidak hanya diproduksi oleh elite politik, tetapi juga direproduksi oleh masyarakat melalui praktik komunikasi sehari-hari, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sosial atas preferensi politik berbasis identitas (Tornberg, 2021) .

Meskipun demikian, pemilih tidak dapat direduksi sebagai objek pasif dalam proses konstruksi tersebut. Mereka secara aktif memaknai identitas berdasarkan pengalaman sosial, posisi dalam struktur masyarakat, serta persepsi terhadap dinamika politik yang berlangsung. Bagi sebagian pemilih, preferensi identitas dipahami sebagai bentuk solidaritas kolektif yang mencerminkan loyalitas terhadap kelompok sosial tertentu (Tahir et al., 2024). Dalam konteks lain, identitas dipandang

sebagai instrumen kepercayaan, di mana kesamaan identitas dianggap sebagai indikator kedekatan nilai sekaligus jaminan representasi kepentingan. Bahkan, dalam situasi ketidakpercayaan terhadap institusi politik, identitas dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi yang memberikan rasa aman bagi pemilih dalam menentukan pilihan politik (Judge B, 2024).

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa preferensi identitas tidak selalu berakar pada irasionalitas, melainkan dapat mencerminkan bentuk rasionalitas kontekstual yang dipengaruhi oleh kondisi sosial tertentu. Ketika institusi politik dipersepsikan tidak mampu menjamin keadilan atau representasi yang setara, pemilih cenderung menggunakan identitas sebagai dasar alternatif dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, identitas berfungsi sebagai *shortcut* kognitif yang membantu pemilih menghadapi kompleksitas informasi politik. Namun rasionalitas tersebut bersifat ambivalen, karena di satu sisi dapat memperkuat representasi kelompok, tetapi di sisi lain berpotensi mengabaikan aspek kapasitas dan integritas kandidat (Clarke N, 2021).

Ambivalensi tersebut menjadi semakin problematik ketika preferensi identitas bertransformasi menjadi eksklusivisme politik. Dalam kondisi ini, identitas tidak lagi dipahami sekadar sebagai sarana representasi, melainkan sebagai batas tegas antara kelompok “dalam” (*ingroup*) dan kelompok “luar” (*outgroup*). Pemilih tidak hanya memilih kandidat yang dianggap berasal dari kelompok yang sama, tetapi juga secara aktif menolak kandidat di luar kelompok tersebut, terlepas dari kualitas yang dimilikinya. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari rasionalitas kontekstual menuju afeksi kolektif yang didorong oleh sentimen identitas, yang pada akhirnya berpotensi memicu polarisasi sosial dalam praktik demokrasi (Bornschier, S, 2021).

Lebih jauh, dominasi preferensi identitas sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti intensitas kompetisi politik, strategi mobilisasi elite, tingkat literasi politik masyarakat, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana identitas menjadi determinan utama dalam perilaku pemilih. Dalam situasi kompetisi politik yang ketat dan tingkat polarisasi yang tinggi, identitas cenderung menjadi instrumen mobilisasi yang paling efektif karena mampu membangkitkan loyalitas emosional secara cepat dan luas. Sebaliknya, ketika institusi politik relatif dipercaya dan wacana publik berkembang secara rasional, peran identitas cenderung melemah dan digantikan oleh pertimbangan yang lebih bersifat programatik (May A, 2023).

Dengan demikian, preferensi identitas dalam demokrasi Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh strategi elite politik, tetapi juga oleh cara pemilih memaknai realitas sosial dan politik di sekitarnya. Oleh karena itu, analisis terhadap politik identitas memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi struktural dan subjektif secara simultan, sehingga tidak terjebak pada simplifikasi bahwa politik identitas semata-mata merupakan bentuk irasionalitas, sekaligus tidak mengabaikan implikasi kritisnya terhadap kualitas demokrasi yang idealnya berorientasi pada meritokrasi dan rasionalitas publik.

Primordialisme Politik dan Krisis Legitimasi Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Praktik primordialisme dalam pemilihan pemimpin di Indonesia tidak hanya merefleksikan dinamika sosial-politik kontemporer, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam basis legitimasi kepemimpinan. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, khususnya melalui kerangka fiqh siyāsah, legitimasi kepemimpinan tidak dibangun atas dasar afiliasi identitas, melainkan pada kualitas normatif yang melekat pada diri seorang pemimpin. Pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan institusi yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dan menegakkan keadilan (Elok et al., 2025). Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi kriteria utama seperti al-‘adālah (integritas moral), al-kifāyah (kapasitas intelektual dan administratif), serta al-amānah (tanggung jawab dan kejujuran). Dengan demikian, konsep kepemimpinan dalam Islam bersifat fungsional dan etis, bukan representasional dalam arti identitas kelompok. (As-sulthaniyyah, 2018)

Namun demikian, dalam praktik demokrasi Indonesia tampak adanya transformasi yang problematik, di mana legitimasi kepemimpinan cenderung bergeser dari basis normatif menuju basis afektif yang berakar pada kesamaan identitas (Kurniati, K, 2021). Primordialisme politik membangun logika bahwa kedekatan identitas merupakan indikator utama kelayakan kepemimpinan, sehingga kriteria objektif seperti kapasitas dan integritas sering kali menjadi subordinat. Dalam kondisi ini, seorang pemimpin tidak lagi dipilih karena kemampuannya mewujudkan keadilan publik, melainkan karena kemampuannya merepresentasikan identitas kolektif tertentu. Pergeseran tersebut tidak sekadar menunjukkan perubahan preferensi politik, tetapi juga mencerminkan perubahan epistemik dalam cara masyarakat memaknai kepemimpinan. (*Al-Ahkām al-Sultāniyyah*.Pdf, n.d.)

Secara kritis, fenomena tersebut menimbulkan kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar fiqh siyāsah. Apabila merujuk pada kerangka pemikiran Al-Mawardi, pertimbangan identitas hanya dapat diterima sejauh tidak menegasikan prinsip al-kifāyah dan al-‘adālah. Namun dalam praktik primordialisme, identitas justru menggantikan kedua prinsip tersebut sebagai dasar utama legitimasi politik. Akibatnya, terjadi reduksi terhadap konsep amānah, di mana kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab moral terhadap seluruh masyarakat, melainkan sebagai mandat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam titik ini, primordialisme tidak hanya berbeda dari prinsip politik Islam, tetapi juga menyimpang secara substantif dari tujuan etis kepemimpinan (Yasir, 2024).

Lebih lanjut, primordialisme politik berpotensi menimbulkan distorsi terhadap prinsip keadilan dalam hukum tata negara Islam. Keadilan dalam fiqh siyāsah bersifat universal dan tidak boleh terikat pada kepentingan kelompok tertentu. Akan tetapi, ketika pemimpin dipilih berdasarkan identitas, muncul kecenderungan kuat untuk menghasilkan kebijakan yang bias terhadap kelompok pendukungnya. Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam praktik demokrasi: sistem yang seharusnya menjamin kesetaraan justru berpotensi melahirkan eksklusivisme politik yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme elektoral. Dalam perspektif Islam, situasi demikian

bertentangan dengan tujuan utama kepemimpinan, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (maṣ laḥ ah ‘āmmah)(Z, 2023).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena primordialisme tidak hanya memengaruhi pilihan politik, tetapi juga membentuk kesadaran normatif pemilih. Ketika identitas dijadikan dasar utama dalam menilai kelayakan pemimpin, berkembang asumsi implisit bahwa kesamaan identitas identik dengan kelayakan kepemimpinan. Logika ini secara tidak langsung menegaskan prinsip meritokrasi yang justru menjadi inti dari konsep kepemimpinan dalam fiqh siyāsah. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar penyimpangan praktik politik, tetapi juga pergeseran paradigma yang berpotensi melemahkan fondasi etika politik itu sendiri(Hanif, n.d.).

Meskipun demikian, penting untuk menghindari simplifikasi bahwa Islam sepenuhnya menolak pertimbangan identitas. Dalam batas tertentu, kesamaan nilai termasuk nilai keagamaan dapat menjadi salah satu faktor dalam membangun kepercayaan politik. Akan tetapi, fiqh siyāsah secara tegas menempatkan identitas sebagai faktor sekunder, bukan sebagai determinan utama dalam menentukan kepemimpinan. Ketika identitas melampaui batas tersebut dan menggantikan prinsip kapasitas serta keadilan, maka pertimbangan tersebut kehilangan legitimasi normatifnya dalam kerangka hukum tata negara Islam.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pemikiran Al-Mawardi tentu tidak dapat diterapkan secara literal. Namun nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai instrumen kritik terhadap praktik politik kontemporer. Oleh karena itu, analisis terhadap primordialisme tidak cukup berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi perlu dilanjutkan dengan evaluasi normatif yang menunjukkan bahwa dominasi identitas dalam pemilihan pemimpin merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip kepemimpinan yang adil, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan (Zheng y, 2021).

Dengan demikian, primordialisme politik dalam demokrasi Indonesia tidak hanya menjadi persoalan sosiologis, tetapi juga mencerminkan krisis normatif dalam legitimasi kepemimpinan. Fenomena ini menandai pergeseran dari kepemimpinan berbasis amānah menuju kepemimpinan berbasis afiliasi, dari keadilan universal menuju loyalitas kelompok, serta dari meritokrasi menuju eksklusivisme identitas. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, kecenderungan tersebut tidak hanya problematik, tetapi juga berpotensi mengancam substansi etika politik yang seharusnya menjadi fondasi dalam praktik demokrasi.

Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan dalam Hukum Tata Negara Islam untuk Demokrasi Modern

Rekonstruksi konsep kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam tidak cukup berhenti pada penegasan ulang nilai-nilai normatif, tetapi harus mampu menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dioperasionalkan dalam realitas politik yang konkret. Dalam konteks ini, model legitimasi berbasis kelayakan publik hanya memiliki makna apabila mampu menjelaskan bagaimana ia dapat menggantikan logika primordialisme yang selama ini memengaruhi praktik pemilihan pemimpin (Aqilah, R., Dkk,2024)..

Secara empiris, dalam berbagai kontestasi politik di Indonesia, preferensi pemilih sering kali dibentuk oleh narasi identitas seperti “memilih yang seagama”, “memilih yang berasal dari etnis yang sama”, atau “memilih yang merepresentasikan budaya lokal”. Dalam kerangka ini, identitas berfungsi sebagai *shortcut* kognitif yang menggantikan evaluasi rasional terhadap kapasitas kandidat. Model rekonstruksi yang diajukan berupaya menolak logika tersebut dengan menggeser standar penilaian dari identitas menuju kelayakan publik sebagai dasar legitimasi kepemimpinan (Pemerintahan & Mada, 2021).

Sebagai ilustrasi, dalam model ini seorang kandidat kepala daerah tidak lagi dapat memperoleh legitimasi semata-mata karena kedekatan identitas religius dengan mayoritas pemilih.

Klaim religiusitas tersebut harus diterjemahkan ke dalam indikator kelayakan publik yang konkret, seperti rekam jejak kebijakan yang adil, kemampuan mengelola anggaran secara efektif, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang inklusif. Apabila klaim tersebut tidak dapat dibuktikan melalui kinerja atau kapasitas yang nyata, maka identitas tersebut kehilangan relevansi politiknya. Pada titik ini terlihat mekanisme deprivatisasi identitas, di mana identitas tidak lagi secara otomatis sah dijadikan dasar pilihan politik, tetapi harus melewati uji rasionalitas publik.

Lebih lanjut, prinsip *al-kifāyah* dalam perspektif pemikiran **Al-Mawardi** tidak lagi dipahami sebagai kualitas normatif yang bersifat abstrak, melainkan dioperasionalkan melalui objektivasi kelayakan. Dalam praktiknya, pemilih didorong untuk menilai kandidat berdasarkan parameter yang lebih terukur, seperti pengalaman administratif, keberhasilan program sebelumnya, serta kapasitas manajerial yang dapat diverifikasi (Sejati, 2023). Dengan demikian, fokus penilaian bergeser dari pertanyaan “apakah kandidat tersebut bagian dari kelompok saya?” menjadi “apakah kandidat tersebut memiliki kemampuan menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif?”. Pergeseran cara pandang ini, meskipun tampak sederhana, secara konseptual mencerminkan perubahan paradigma legitimasi kepemimpinan.

Selanjutnya, prinsip *al-amānah* direkonstruksi menjadi konsep akuntabilitas yang terinstitusionalisasi. Dalam praktik demokrasi modern, seorang pemimpin tidak lagi dianggap amanah semata-mata karena citra religius atau kedekatan identitas, tetapi karena adanya mekanisme yang memungkinkan pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Misalnya, transparansi pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi publik, serta evaluasi kinerja berbasis data menjadi indikator konkret dari prinsip amanah tersebut. Dengan demikian, asumsi bahwa kesamaan identitas secara otomatis menjamin kepercayaan digantikan oleh prinsip bahwa kepercayaan harus dibangun melalui sistem yang akuntabel (Wulandari et al., 2026).

Pada saat yang sama, prinsip *al-‘adālah* direkonstruksi sebagai keadilan yang dapat diuji melalui kebijakan yang dihasilkan. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang berasal dari kelompok mayoritas tidak dapat melegitimasi kekuasaannya hanya dengan klaim representasi identitas apabila kebijakan yang dihasilkan justru bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dalam model ini, keadilan tidak diukur dari identitas pemimpin, tetapi dari dampak kebijakan yang dihasilkan bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik

primordialisme yang sering kali menyamakan representasi identitas dengan keadilan politik (Vanessa et al., 2025).

Namun demikian, rekonstruksi ini tidak berangkat dari asumsi bahwa identitas akan sepenuhnya hilang dari arena politik. Dalam realitas sosial, identitas tetap menjadi faktor yang memengaruhi preferensi pemilih. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukanlah menghapus identitas dari politik, melainkan mendisiplinkannya. Artinya, identitas hanya dapat berperan dalam batas tertentu selama tidak menggantikan evaluasi terhadap kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap keadilan. Dalam praktiknya, pemilih masih dapat mempertimbangkan kedekatan identitas, tetapi keputusan politik pada akhirnya harus didasarkan pada kelayakan publik yang dapat diuji secara rasional.

Dengan demikian, konsep rekonstruksi ini tidak dimaksudkan sebagai ideal normatif yang abstrak, melainkan sebagai kerangka evaluatif yang konkret dalam menilai kepemimpinan. Kerangka tersebut menggeser cara kerja legitimasi politik dari yang berbasis afiliasi menuju yang berbasis evaluasi, serta dari legitimasi simbolik menuju legitimasi substantif. Tanpa operasionalisasi semacam ini, konsep kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam berisiko tetap berada pada tataran normatif semata dan kehilangan daya korektifnya terhadap praktik demokrasi yang masih didominasi oleh logika primordialisme.

KESIMPULAN

Preferensi identitas yang berbasis suku, etnis, agama, dan budaya dalam praktik demokrasi Indonesia merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi aktor politik, media, dan pengalaman sosial masyarakat. Dalam perkembangannya, identitas tidak lagi sekadar menjadi penanda kultural, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen politik yang mampu membangun solidaritas kelompok sekaligus menciptakan eksklusivitas terhadap kelompok lain. Kondisi tersebut memengaruhi orientasi politik masyarakat dan mendorong pilihan kepemimpinan yang lebih didasarkan pada kedekatan identitas daripada pertimbangan kapasitas dan kualitas calon pemimpin.

Dominasi pertimbangan primordial tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik demokrasi yang berkembang dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam hukum tata negara Islam yang menempatkan keadilan, kompetensi, dan tanggung jawab publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep kepemimpinan melalui model legitimasi kelayakan publik yang menjadikan kapasitas, keadilan, dan akuntabilitas sebagai ukuran utama dalam menilai dan melegitimasi seorang pemimpin.

Dalam model tersebut, identitas tetap diakui sebagai bagian dari realitas sosial dan tidak dapat dihilangkan dari dinamika politik masyarakat. Namun, identitas tidak boleh menjadi faktor dominan yang mengesampingkan kualitas substantif seorang calon pemimpin. Kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip hukum tata negara Islam dan kebutuhan masyarakat demokratis ialah kepemimpinan yang berorientasi pada meritokrasi, inklusivitas, dan tanggung jawab publik. Rekonstruksi ini memberikan landasan normatif dan praktis bagi penguatan demokrasi Indonesia agar proses politik tidak terjebak pada sentimen primordial, melainkan diarahkan pada penilaian

yang rasional dan berbasis kualitas kepemimpinan. Pergeseran paradigma tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

REFERENCES

- Ahkam as-Sultaniyyah.pdf. (n.d.).
- As-sulthaniyyah, A. (2018). Volume 15 Nomor 1 2018 Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In Indonesia : The Study Of The Book Of Al-. 15, 39–50.
- Aqilah, R., Nurhikma, N., & Kurniati, K. (2024). Pemikiran Al-Mawardi; Kritik Terhadap Konsep Politik Nicollo Machiavelli. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 758–767.
- Bornschiefer, S., Häusermann, S., Zollinger, D., & Colombo, C. (2021). How “Us” and “Them” Relates to Voting Behavior—Social Structure, Social Identities, and Electoral Choice. *Comparative Political Studies*, 54, 2087 – 2122. <https://doi.org/10.1177/0010414021997504>.
- Cai, X. (2024). Electoral Democracy: The Manifestation of Collective Will and Deliberation. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/27537048/51/20240659>.
- Clarke, N., Jennings, W., Moss, J., & Stoker, G. (2021). Voter Decision-Making in a Context of
- Low Political Trust: The 2016 UK EU Membership Referendum. *Political Studies*, 71, 106 – 124. <https://doi.org/10.1177/00323217211003419>.
- Elok, K., Hafizd, J. Z., & Rana, M. (2025). Al- Mawardi ’ s Leadership Concept and Its Relevance to Indonesian Democracy. 3(1), 47–62.
- Hanif, D. (n.d.). Analisis Fiqh Siyasa Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab AlAhkam As-Shulthaniyyah. 153–166.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Judge, B. (2024). The birth of identity biopolitics: How social media serves antiliberal populism. *New Media & Society*, 26, 3273 – 3289. <https://doi.org/10.1177/14614448221099587>.
- Kurniati, K., & Rahmiati, R. (2021). The Epistemology Of Siyasa Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 39–62.
- Kreiss, D., Lawrence, R. G., & McGregor, S. C. (2020). Political Identity Ownership: Symbolic Contests to Represent Members of the Public: *Social Media and Society*, 6(2), 205630512092649.
- Latifa, D. (2023). Politisasi Identitas dalam Pemilu. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.377>.

- Lubis, F., Nasution, F., & Harahap, R. (2024). The Commodification of Religious Rituals: Representations of Political Actors in Indonesian Elections. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.214>.
- May, A., & Czymara, C. (2023). Careless whisper: Political elite discourses activate national identities for far-right voting preferences. *Nations and Nationalism*. <https://doi.org/10.1111/nana.12985>.
- Pemerintahan, D. P., & Mada, U. G. (2021). Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru Mahpudin 1. 8090, 148–160. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>
- Pribadi, Y. (2021). Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.22204>.
- Sejati, S. P. (2023). POLITIK PRIMORDIAL DAN POLITIK IDENTITAS DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA. 154–163.
- Sobari, W. (2023). Non-Religious and Ethnic Orientations in the Voting Process: A Recent Study of Javanese Voters. *International Journal of Asia-Pacific Studies*, 19(2), 131–161. <https://doi.org/10.21315/ijaps2023.19.2.6>
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Political Dynamics of Islamic Law in the Reform Era: A Study of the Response of Muhammadiyah Cadres in Central Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12415>.
- Tahir, M., Islam, U., Kurniati, dan Marilang (2024). *Problematisasi Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia*. 17(1), 142–157.
- Testriono, T. (2024). Mencari Peran Islam Politik dalam Demokrasi Indonesia. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v31i3.43753>.
- Törnberg, P., Andersson, C., Lindgren, K., & Banisch, S. (2021). Modeling the emergence of affective polarization in the social media society. *PLoS ONE*, 16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258259>.
- Vanessa, C., Tania, N., & Tio, A. (2025). Penerapan Nilai Al- ‘ Adālah dalam Good Governance Islam dalam Menjawab Tantangan Keadilan Pemerintah Modern. 2(6), 389–401.
- Wulandari, A., Ahmad, A. H., & Bandung, U. I. (2026). PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM AL-QUR’AN II. 7(1), 1–16.
- Yasir, M. (2024). PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA. 2(42), 29–42.
- Z, R. M. (2023). Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sulta niyyah wa Wilayat al-Diniyyah. 4(01), 35–42.
- Zamzamy, F. (2025). Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik. *Menara Tebuieng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.33752/menaratebuieng.v2oi2.8399>.

Zheng, Y., Epitropaki, O., Graham, L., & Caveney, N. (2021). Ethical Leadership and Ethical Voice: The Mediating Mechanisms of Value Internalization and Integrity Identity. *Journal of Management*, 48, 973 - 1002. <https://doi.org/10.1177/01492063211002611>.